

EVALUASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA DENGAN MENGUNAKAN MODEL WILLIAM DUNN

Daryati Dewi Nur Nadila

Universitas Negeri Surabaya
Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya
daryatinadila@gmail.com

Abstract: The independent curriculum policy is a new policy program by the Ministry of Education and Culture that focuses on increasing the minimum in the form of literacy, numeracy, and character surveys. This curriculum was enacted to improve the existing system in the previous curriculum. In its implementation, often many educational institutions experience obstacles in carrying out the independent curriculum policy. Therefore, evaluation is needed to see weaknesses, strengths, and implementation in the field. The purpose of this study was to evaluate the implementation of the independent curriculum policy using the William Dunn model. This research uses qualitative research methods with a type of library research approach by exploring information through literature regarding the evaluation of independent curriculum policies using the William Dunn model. The criteria for policy recommendations are the same as policy evaluation criteria, including: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness.

Keywords: evaluation, William Dunn policy, merdeka curriculum

Abstrak: Kebijakan kurikulum merdeka merupakan program kebijakan baru oleh Kemendikbudristek yang berfokus pada peningkatan minimum berupa literasi, numerasi, dan survei karakter. Kurikulum ini diberlakukan untuk memperbaiki sistem yang sudah ada pada kurikulum sebelumnya. Di dalam pelaksanaannya seringkali banyak lembaga pendidikan yang mengalami hambatan dalam menjalankan kebijakan kurikulum merdeka. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi untuk melihat kelemahan, kekuatan, serta implementasi di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan kurikulum merdeka menggunakan model William Dunn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi pustaka (*library research*) dengan menggali informasi melalui literatur berkenaan dengan evaluasi kebijakan kurikulum merdeka dengan menggunakan model William Dunn. Adapun kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, antara lain: efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Kata kunci: evaluasi, kebijakan William Dunn, kurikulum merdeka

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan yang berfungsi untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang siap dalam berbagai bidang kehidupan. Di dalam menjalankan pendidikan diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaannya dan dalam hal ini yang memegang peran penting adalah kurikulum. Kurikulum merupakan suatu cetak biru yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuannya.

Kurikulum juga menyediakan pengalaman yang akan dilalui oleh peserta didik dalam pelaksanaan pendidikan sehingga kurikulum juga nantinya yang akan berbentuk sejumlah mata pelajaran.

Sejatinya pergantian kurikulum dari kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka merupakan dampak dari adanya pandemi covid-19 sehingga seringkali kurikulum ini disebut sebagai kurikulum darurat. Kurikulum merdeka memberikan kesempatan belajar yang sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada siswa untuk belajar dengan bahagia, santai dan bebas dari tekanan tanpa menghiraukan bakat alami yang dimilikinya. Dalam proses pembelajaran guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Di dalam kurikulum ini juga terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Dimana dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek ini tidak bertujuan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran.

Pelaksanaan evaluasi kurikulum ditujukan untuk mengetahui sejauhmana efektifitas, relevansi, efisiensi, dan *feasibility* kurikulum dari penerapannya. Dengan adanya evaluasi kurikulum maka dapat terlihat hal-hal yang perlu untuk diperbaiki, ditingkatkan, dan dipertahankan dari setiap komponen kurikulum tersebut. Sehingga evaluasi ini akan memiliki eksistensi yang urgen untuk terus dilaksanakan. Pada penelitian ini dilaksanakan evaluasi kurikulum merdeka untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan apakah dampak kebijakan kurikulum merdeka ini telah sesuai tujuan yang diharapkan.

Pada penelitian ini nantinya akan mengkaji evaluasi kebijakan menggunakan model yang dikemukakan oleh William Dunn. Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan menjadi latar belakang peneliti untuk mengetahui evaluasi dari pelaksanaan kebijakan kurikulum merdeka sehingga nantinya akan didapatkan hasil untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kurikulum merdeka di berbagai lembaga pendidikan secara maksimal. Adapun kriteria rekomendasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, antara lain: efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam menulis artikel ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan studi literature atau *Library Research*. Dalam studi pustaka peneliti melakukan kegiatan pengumpulan literatur-literatur yang berkaitan dengan kebijakan model William Dunn yang kemudian peneliti telaah kembali terhadap literatur-literatur tersebut secara mendalam sehingga dapat menghasilkan inti dalam pembahasan maupun hasil kesimpulannya. Dalam penelitian kualitatif, kajian pustakan harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. (Ahmadi & Widdah, 2022) Artinya, harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti serta membutuhkan analisis deskriptif agar memberikan gambaran dan keterangan secara jelas, objektif, sistematis, analitis, maupun kritis mengenai evaluasi kebijakan kurikulum merdeka dengan menggunakan metode versi William Dunn. (Fika et al., 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

DEFINISI EVALUASI KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan publik adalah bentuk penilaian terhadap seluruh kebijakan-kebijakan politik di bidang sosial yang menyangkut kehidupan publik. Evaluasi merupakan

salah satu tingkatan dan tahapan di dalam proses kebijakan publik. Evaluasi menjadi salah satu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program berjalan secara baik atau tidak. Banyak definisi tentang evaluasi, menurut William Dunn istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angkat (*rating*), penilaian (*assessment*), serta kata-kata yang menyatukan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Di dalam arti yang lebih spesifik disebutkan bahwa evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003)

Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William Dunn dalam Agustino (2008:187) berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan. Ketika ia bernilai manfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hal tersebut memberikan sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan bermanfaat jika fungsi evaluasi kebijakan memang telah terpenuhi dengan baik. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan adalah harus memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja suatu kebijakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasanya evaluasi kebijakan publik adalah penilaian serta pengukuran seluruh kebijakan mengenai nilai atau manfaat kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. (Arnol, 2013)

Ali Imron menjelaskan bahwasanya kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan negara, memberikan pengertian kebijakan pendidikan (*educational policy*) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor situasional yang dijadikan sebagai dasar mengoperasikan pendidikan. Pertimbangan akan digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan agar tujuan dapat tercapai. Kebijakan pendidikan akan sangat erat kaitannya dengan kebijakan publik. Oleh karena itu saat terjadi kebijakan publik maka akan berpengaruh kepada perubahan kebijakan pendidikan. Bahkan pada saat pergantian menteri dapat pula mengganti kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan pendidikan adalah prosedur untuk menghasilkan informasi di bidang pendidikan dengan menggunakan data sebagai masukan bagi perumusan alternatif kebijakan saat mengambil keputusan dalam rangka memecahkan permasalahan pendidikan. (Rokim, 2019)

EVALUASI KEBIJAKAN MODEL WILLIAM DUNN

Evaluasi kebijakan model William Dunn adalah sebuah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan dalam proses analisis kebijakan. Menurut Dunn, evaluasi kebijakan adalah ilmu yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang muncul karena diterapkannya suatu kebijakan. Evaluasi menjadi jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sebagai dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif perbaikan.

William Dunn mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, antara lain:

1. Efektifitas (*effectiveness*)
Hal ini berkaitan dengan apakah alternatif telah mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau telah mencaoi tujuan yang direncanakan. Efektifitas berhubungan dengan rasionalitas teknis selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.
2. Efisiensi (*efficiency*)

Berkenaan dengan jumlah usaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah hubungan antara efektivitas dan usaha dan umumnya diukur dari ongkos moneter.

3. **Kecukupan (*adequacy*)**
 Berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dengan hasil yang diharapkan.
4. **Perataan (*equity*)**
 Hal ini erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berbeda di masyarakat. Kriteria kesamaan erat hubungannya dengan konsepsi yang saling bersaing yaitu keadilan atau kewajiban dan terhadap konflik sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risoris masyarakat.
5. **Responsivitas (*responsiveness*)**
 Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya.
6. **Ketepatan (*appropriateness*)**
 Kriteria ini berhubungan dengan rasionalitas, substantif karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketetapan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Kebijakan yang menjadi faktor penelitian ini adalah menilai bagaimana pengembangan Kurikulum Merdeka dapat menjadi acuan dan pedoman untuk pencapaian tujuan pendidikan di Indonesia. Evaluasi ini dilakukan agar struktur kurikulum dan model pembelajaran selaras dan mendorong siswa menjadi lebih aktif. (Doktor Manajemen Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara Jl William Iskandar Psr & Syukri, 2022)

Kriteria yang digunakan untuk mengkaji evaluasi kebijakan menurut William Dunn digambarkan pada tabel berikut :

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan unruk memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

PENERAPAN EVALUASI KEBIJAKAN WILIAM DUNN DALAM KURIKULUM MERDEKA

Efektifitas

Efektifitas adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sehingga menunjukkan keberhasilan dari segi tercaou tidaknya sasaran yang ditetapkan. Semakin hasil mendekati sasaran maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Penilaian ini ditujukan

untuk menjawab ketetapan waktu pencapaian hasil atau tujuan kebijakan. Efektivitas pada evaluasi kebijakan yang dimaksud yaitu pencapaian hasil dari penerapan evaluasi kurikulum merdeka yang dilihat dari ketepatan waktu kesesuaian hasil dengan tujuan yang diinginkan.

Dari berbagai kajian literatur ditemukan bahwasannya penerapan Kurikulum Merdeka sejatinya telah mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka hampir menyeluruh diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Peneliti berpendapat agar kinerja kebijakan dapat mencapai hasil yang efektif ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain :

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan Kurikulum Merdeka;
- 2) Perlunya pemahaman Kurikulum Merdeka secara komprehensif baik konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan.

Efisiensi

Efisiensi menurut William Dunn berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan persamaan dari rasionalitas adalah hubungan antara efektivitas dan usaha. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Penerapan Kurikulum Merdeka dinilai dilaksanakan cukup efektif namun masih diperlukannya ketersediaan sumber daya yang memadai. Dibutuhkan anggaran dana yang sesuai dengan perencanaan Kurikulum Merdeka. Adanya dana yang sesuai akan memudahkan pelaksanaan Kurikulum Merdeka dalam berbagai aspek yang dijalankan. Tanpa adanya dana maka kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan optimal.

Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan diartikan sebagai tujuan yang telah dicapai dan dirasakan serta mampu mencukupi di dalam berbagai hal. William Dunn mengemukakan bahwa kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dapat disimpulkan bahwa kecukupan berhubungan dengan efektivitas seperti mengukur atau memprediksi seberapa jauh yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Keberadaan Kurikulum Merdeka dapat memberikan pengaruh dan manfaat yang signifikan dalam proses pembelajaran. Dibutuhkan dukungan berbagai pihak terutama Pemerintah dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka sehingga sesuai dengan tujuan dan mencukupi segala kebutuhan di dalam proses pembelajaran. Kurikulum Merdeka hadir sebagai solusi yang dianggap paling efektif dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan karena memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya termasuk berkaitan dengan permasalahan literasi membaca siswa.

Adanya Kurikulum Merdeka dianggap mampu mencukupi dan memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang menjadi sasaran. Maka hendaknya pendampingan, pemberian sosialisasi, serta pemberian sarana dan prasarana diharapkan mampu diberikan oleh Pemerintah maupun pihak yang lain. Dengan adanya pendampingan dan penyediaan sumber daya yang sesuai akan meningkatkan manfaat dari adanya Kurikulum ini. Diperlukan juga berbagai evaluasi secara terus menerus atas implementasi kebijakan tersebut sehingga akan menghasilkan kebijakan yang optimal.

Perataan

Perataan dalam kebijakan diartikan sebagai keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan. William Dunn menyatakan bahwa kesamaan erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan merujuk pada distribusi akibat dan usaha kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan.

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwasannya pelaksanaan Kurikulum Merdeka telah mampu dijalankan secara tegas namun masih banyak kendala maupun hambatan dalam pelaksanaan kurikulum ini. Impelentasi kebijakan Kurikulum Merdeka masih banyak kendala terutama dalam hal pemerataan. Kendala ini antara lain berkaitan dengan persiapan yang masih belum matang, kekurangan SDM yang mumpuni, kurangnya sosialisasi, serta masih banyak ditemui akses pembelajaran yang tidak merata terutama dalam hal akses digital dan internet di berbagai wilayah.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat kurangnya pemerataan ini dibutuhkan kerja sama berbagai pihak dalam penyediaan akses internet dan digital, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi dan skill guru mengenai kurikulum merdeka dan memberikan sosialisasi agar SDM yang ada di sekolah mampu menjalankan Kurikulum Merdeka secara maksimal.

Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas yang berarti taggapan sasaran kebijakan atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William Dunn responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok di masyarakat tertentu.

Pelaksanaan kebijakan Kurikulum Merdeka dapat diterima dengan baik oleh pihak sekolah dan dukungan yang positif dari semua pihak termasuk yang terlibat dalam pembelajaran. Respon yang diberikan oleh sasaran kebijakan telah baik namun tetap dibutuhkan evaluasi terhadap penyediaan fasilitas dan pendampingan dalam proses pembelajaran. Adanya pendampingan ini akan membantu pihak sekolah termasuk guru dalam menjalankan dan menyesuaikan Kurikulum Merdeka terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. (Suhartono, 2021)

Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William Dunn menyatakan bahwa kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas, alternatif, karena menyangkut pada subtansi tujuwa bukan cara untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Artinya ketepatan dapat diisi oleh keberhasilan kebijakan lain jikalau ada. Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun dimungkinkan alternatif lain yang dirasa lebih baik dalam pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara dinamis. (Akibu, 2014)

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya evalusi kebijakan Kurikulum Merdeka penting untuk dilakukan. Adanya evaluasi dapat membantu pembuat kebijakan dalam menilai apakah kebijakan yang telah dilaksanakan mampu berjalan sesuai

dengan tujuan. Penulis menggunakan model William Dunn untuk mengevaluasi kebijakan Kurikulum Merdeka. Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William Dunn dalam Agustino (2008:187) berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan. Adapun kriteria rekomendasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, antara lain: efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Menurut kriteria kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan Kebijakan Kurikulum Merdeka secara keseluruhan telah berjalan dengan baik namun masih ditemukan beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Dari indikator tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka masih banyak membutuhkan sosialisasi, pendampingan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pembelajaran. Selain itu masih dibutuhkannya pemerataan akses digital dan internet untuk membantu guru dan pihak sekolah dalam melaksanakan Kebijakan Kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak agar dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka berjalan dengan maksimal dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A., & Widdah, M. El. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Pendidikan). ... *Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 104–113. <https://www.dinastirev.org/JMPIS/article/view/1376%0Ahttps://www.dinastirev.org/JMPIS/article/download/1376/827>
- Akibu, R. S. (2014). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di Sma Negeri 1 Ampibabo Kecamatan Mpibabo Kabupaten Parigi Moutong. *E-Jurnal Katalogis*, Volume 2(1), 8–14.
- Arnol, M. (2013). *Evaluasi Kebijakan Program Jaminan Masyarakat Semesta di Kabupaten Lampung Utara*.
- Doktor Manajemen Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara Jl William Iskandar Psr, P. V, & Syukri, M. (2022). EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DI MADRASAH ALIYAH AL HUDA PANGKALAN SUSU Khairani Nasution. *Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 144(1), 144–156.
- Fika, N., Fauzi, A., & Qurtubi, A. (2023). *Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern*. 05(04), 16737–16747.
- Rokim. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Islam*, 14(2), 60–69.
- Suhartono, O. (2021). Kebijakan Merdeka Belajar dalam Pelaksanaan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 8–19. <https://doi.org/10.18860/rosikhun.v1i1.13897>